DAFTAR PUSTAKA

Anggraini Putri, A. (2023) ‘Kreativitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Dana Keistimewaan Di Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta’. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmd" Apmd".

An-Nur.ac.id. (2023). *Empat Prinsip Dasar Pemberdayaan Komunitas: Partisipasi, Kemandirian, Keragaman, dan Keberlanjutan*.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Barimbing, S.R.I.M.L. (2022) ‘Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik’.

Damayanti, R.A. and Syarifuddin, S. (2021) ‘DEKONSTRUKSI HUBUNGAN KEAGENAN DALAM PROSES ANGGARAN’, *Contemporary Journal on Business and Accounting*, 1(1), pp. 89–118.

De Tocqueville, A. (2003). *Democracy in America*. London: Penguin Books.

Dewi, R. (2022). *Negara Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Diandra, D. (2021) *Pengantar Antropologi*. Diva Press.

Fauzan, A. (2021). *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fitriani, L. (2021). "Lembaga Adat sebagai Bagian dari Pemerintahan Desa: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10(1), hlm. 45–58.

Gayo, A.A. (2018) ‘Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)(Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah))’, *Jurnal Penelitian Hukum P- ISSN*, 1410, p. 5632.

Gorby, A. *et al.* (2023) ‘Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah’, *Perspektif*, 12(4).

Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism?. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.

Gunawan, J. and Supriyadi, S. (2023) ‘Impelementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Adat dan Pengakuan Perlindungan Masyarakat Adat Pekasa, Kabupaten Sumbawa)’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), pp. 329–342.

Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Hidayat, R. (2017). "Lembaga Adat sebagai Pilar Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47(2), hlm. 185–202.

Hidayat, R. (2022). *Supremasi Hukum dalam Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hooghe, L., & Marks, G. (2001). *Multi-Level Governance and European Integration*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kamal, M. (2019) 'Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014', *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), pp. 18–28.

Kusumastuti, R. (2020). *Pembangunan Partisipatif dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfud MD. (2010). "Membangun Hukum Berdimensi Budaya dan Karakter Bangsa." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7(4), hlm. 1–15.

Mulyadi. (2020). Efektivitas Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Wilayah Adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210–225.

Mulyana, A. (2023). *Kepastian Hukum sebagai Pilar Negara Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Nurdin, A. (2019). "Hukum Adat dan Sistem Pemerintahan Daerah: Relasi Kultural dalam Bingkai Otonomi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 5(1), hlm. 60–74.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016

Prasetyo, T. & Damayanti, S. (2023). *Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Kajian Teoritis dan Praktis*. Malang: UB Press.

Purba, O. *et al.* (2023) *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Putra, I. W., & Sari, M. (2023). "Asas Keadilan dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-59.

Putra, W.I. (2017) 'Peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal di Kabupaten Paser Kalimantan timur'. Pascasarjana.

Putri, N. A., & Wijaya, H. (2021). "Asas Partisipasi dalam Negara Hukum: Studi Demokrasi dan Keterlibatan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45-59.

Rahardjo, M. A. (2022). *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi*

Negara. Bandung: Refika Aditama.

Rahardjo, S. (2021). *Asas Legalitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Yogyakarta: UII Press.

Rahman, I.N., Triningsih, A. and Kurniawan, N. (2011) 'Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8(5), pp. 767–802.

Rahmawati, S., & Kurniawan, D. (2020). "Negara Hukum dan Demokrasi: Studi tentang Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 134-149.

Rahmawati, S., & Kurniawan, D. (2020). "Negara Hukum dan Demokrasi: Studi tentang Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 134-149.

Rambe, H. (2019). Peran Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 33–45.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sagala, H.T.W. (2022) 'Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh', *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3(2), pp. 115–129.

Salim, M. (2016) 'Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), pp. 244–255.

Samsul, I. (2016) 'Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*(Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel Dan Di Provinsi Papua) Strengthening The Adat Institutions As An Alternative Dispute Resolution Institutions (A Study On T', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), pp. 127–142.

Santoso, E. (2023). *Prinsip-Prinsip Negara Hukum di Era Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Santoso, E., & Dewi, L. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum." *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 8(2), 100-115.

Sarbini, & Ma'arij, A. (2020). Lembaga Adat dan Otonomi Daerah: Analisis Kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan Lokal. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Daerah*, 12(3), 156–172.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Sumaryono, E. (2015). "Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa: Studi di Desa Adat Bali Aga." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19(3), hlm. 233–246.

Suryono, B., & Hendrawan, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik: Perspektif Hukum dan Administrasi*. Jakarta: Kencana.

Tahan, A., Kehik, B.S. and Mael, M.Y. (2021) 'Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan

Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau', *Jurnal Poros Politik*, 3(1), pp. 1–7.

Takiudin, T. (2020) 'Fungsi lembaga adat desa sebagai mediator penyelesaian konflik keluarga muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah'. UIN Mataram.

Timotius, R. (2018) 'Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), pp. 323–344.

Tutik, T.T. and SH, M.H. (2016) *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.

Ulya, Z. (2014) 'Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh', *Jurnal Konstitusi*, 11(2), pp. 371– 392

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo, T. (2020). *Pemisahan Kekuasaan dalam Negara Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.